



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.08.0002
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Nama Rekening : Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
Jumlah Anggaran (DPA) : 23,400,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 23,400,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : APRIL

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				23,400,000.00
2	18 April 2024	00204	BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN (PENGURUS BARANG) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN JANUARI S/D APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	4,400,000.00	19,000,000.00
3	18 April 2024	00205	BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN (PEMBANTU PENGURUS BARANG) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN JANUARI S/D APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	3,400,000.00	15,600,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	7,800,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	0.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	7,800,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA KEMUGARAN
BALITRAKUNDA
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730125 200502 1 001

Makassar, 30 April 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN
St. NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0002.5.1.01.03.08.0002

Buku Kas No. : 00204

Tanggal : 18-04-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == EMPAT JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN (PENGURUS BARANG) KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN JANUARI S/D APRIL TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN WUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 4.400.000,-

MENGETAHUI

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK


YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar, 18-04-2024
Yang Menerima,


LAODE MUHAMMAD ISHAK, S.Kom
NIP. 198501052019031004

NO. DAFTAR: 00114/505000000020000/2024

**DAFTAR: BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN (PENGURUS BARANG)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI
PELAKSANAAN TUGAS ASN BULAN JANUARI S/D APRIL TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor / Tanggal SK : 3465/188.4.45/TAHUN 2024 / 29 Desember 2023
Kegiatan : 5.05.01.2.02 / Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0002 / Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Rekening : 5.1.01.03.08.0002 / Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	LAODE MUHAMMAD ISHAK, S.Kom 77.464.258.1-801.000 Rekening : 1462010000012621	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Pengurus Barang)	1.100.000	x 4		4.400.000				220.000	4.180.000	
	JUMLAH					4.400.000				220.000	4.180.000	

TERBILANG: EMPAT JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 18-04-2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN**


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST. M.AP
NIP. 197204252005021001

**KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SELAKU PPTK**


YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.297.298.2-804.000
NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
ALAMAT : JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 402 ✓
MASA PAJAK : 04-04
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.220.000 ✓
TERBILANG : Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

URAIAN : Bayar Honor Pengurus Barang Sub Keg Penyediaan ADM Pelaksanaan Tugas ASN

NPWP PENYETOR : 00.297.298.2-804.000
NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 02875502560517
MASA AKTIF : 16/05/2024 10:03:21

Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Jumlah Setoran : 220.000
Masa Uang : 108

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

DATA SETORAN :
Kode billing : 02875502560517
NPWP : 002972982804000
Nama Wajib Pajak : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : 220.000
Kode Cabang bank : 146000
Tanggal buku : 19-04-2024
Tanggal & Jam Bayar : 18-04-2024 15:17:46
NTB : 000000981668
NTPN : 0688558838KRCCT
STAN : 981668

KEMENTERIAN KEUANGAN

BUKTI PENERIMAAN NEGERA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SUISELABA



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 3465/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU LINGKUP PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Pengguna Barang, dan Wali Kota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang;
- b. bahwa menindaklanjuti hal tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menunjuk Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 2023 Nomor 57;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 24);
14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berwenang dan bertanggungjawab untuk:

a. Pengurus Barang Pengguna:

1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

3. melaksanakan . . .

3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. melakukan *stock opname* barang persediaan;
16. menyiapkan dokumen, antara lain: fotocopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

b. Pengurus Barang Pembantu:

1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. melakukan *stock opname* barang persediaan;
16. menyiapkan dokumen, antara lain: fotocopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

- KETIGA : Kepada Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan honorarium dengan besaran pemberian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Besaran pemberian honorarium dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
5. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 3465/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	NAMA, NIP, GOLONGAN, DAN JABATAN	
		PENGURUS BARANG PENGGUNA	
1	2	3	
1	SEKRETARIAT DPRD	Nama : NUR CHALID, S. IP NIP : 19800607 200801 1 013 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
2	SEKRETARIAT DAERAH	Nama : SUTRIANY S. Sos NIP : 19761104.200801.2.014 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
3	DINAS KEBUDAYAAN	Nama : DEDYANTO, SE NIP : 19831023 201001 1 023 Gol : III/c Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nama : ANDI ATMANSYAH RAHMAN, S. Kom NIP : 19880810 202012 1 003 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
5	DINAS PARIWISATA	Nama : HERIYANTO ISMAIL, SE NIP : 19820406 200801 1 003 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
6	DINAS PERHUBUNGAN	Nama : MUHAMMAD RUSLAN RASYID, S. Sos NIP : 19760702 201001 1 002 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
7	DINAS PERDAGANGAN	Nama : ERNA, A. Md NIP : 19800928 201001 2 010 Gol : II/c Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
8	DINAS SOSIAL	Nama : MUHAMMAD ARFAH, S. Sos NIP : 19950316 202012 1 006 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nama : NURWILDHANA HARDIYANTI IDSYAM, S. Sos NIP : 19900603 201503 2 004 Gol : III/b Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
10	DINAS PENATAAN RUANG	Nama : SITTI DAHNIAR, SE NIP : 19680424 199603 2 003 Gol : III/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
11	DINAS PEKERJAAN UMUM	Nama : ASNAWATY YUSUF NIP : 19721008 200801 2 013 Gol : II/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
12	DINAS KETENAGAKERJAAN	Nama : HASNI NIP : 19680221 201407 2 002 Gol : II/b Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
13	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN	Nama : SUMIDIN, S. Pt NIP : 19751228 200605 1 002 Gol : III/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
14	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Nama : WAHYULLAH, S. Ag NIP : 19701025 200901 1 005 Gol : II/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nama : MARHANI SENNI NIP : 19780527 201001 2 007 Gol : II/c Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	
16	DINAS PERTANAHAN	Nama : HARIANI, S. Pd., MM NIP : 19681024 198903 2 008 Gol : IV/b Jabatan : Pengurus Barang Pengguna	

17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Nama : ANDI WAHYU SETIAWAN, S. STP NIP : 19941122 201808 1 001 Gol : III/b Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
18	DINAS PENDIDIKAN	Nama : ABDUL KARIM NIP : 19671231 198907 1 004 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
19	DINAS KESEHATAN	Nama : NUR AINUN MUKHLISA KADULLAH, SKM NIP : 19771231 200604 2 015 Gol : III/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH	Nama : H. ABDUL SYAHID SAMAD, ST., M. Si NIP : 19690121 200701 1 025 Gol : III/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nama : AZHAR ABDURACHIM, ST NIP : 19770310 201411 1 002 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Nama : HARRY MUHARRAM AMRAL, SE NIP : 19750114 200604 1 009 Gol : III/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nama : DARMANSYAH NATSIR, SE NIP : 19881008 202203 1 002 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Nama : HERMAN, S. Pt NIP : 19750406 200604 1 008 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nama : ANDI RIDWAN, D, S. AP NIP : 19830401 200901 1 006 Gol : II/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Nama : SITI RUKMINI, AS NIP : 19850428 201001 2 009 Gol : II/b Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nama : ABD. RACHMAN NIP : 19701112 201001 1 004 Gol : II/c Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
28	DINAS PERPUSTAKAAN	Nama : SURIANI NIP : 19700802 200701 2 002 Gol : II/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
29	DINAS KEARSIPAN	Nama : LUDIATER, SE NIP : 19710124 200312 2 004 Gol : III/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nama : SYAHBUDDIN, SH NIP : 19801104 200903 1 001 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama : RISKA SYARIFUDDIN, SE NIP : 19831004 201412 2 002 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nama : SURIYANI, S. Sos NIP : 19760607 200701 2 024 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA
33	DINAS KETAHANAN PANGAN	Nama : INA ROSLIANA RAHMAN, S. STP NIP : 19700310 200312 2 003 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
34	INSPEKTORAT DAERAH	Nama : LEONARDO KONSTANTIN RESY NAEN, S. Kom NIP : 19870609 201903 1 004 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nama : ASRI, SE NIP : 19770204 200801 1011 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nama : LAODE MUHAMMAD ISHAK, S. Kom NIP : 19850105 201903 1 004 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
37	KECAMATAN BIRINGKANAYA	Nama : JAYANTI MAKASARI, A. Md. Kom NIP : 19840909 201001 2 028 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Kecamatan Biringkanaya Kota
38	KECAMATAN BONTOLA	Nama : FITRI, S. Kom NIP : 19870813 202012 2 003 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
39	KECAMATAN MAKASSAR	Nama : TAMRIN, S. Sos NIP : 19660504 201410 1 002 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
40	KECAMATAN MAMAJANG	Nama : SYAMSUL RIJAL NIP : 19791021 200801 1 009 Gol : II/c Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
41	KECAMATAN MANGGALA	Nama : ILHAM, S. Sos NIP : 19730613 199303 1 004 Gol : III/c Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
42	KECAMATAN MARISO	Nama : SALAWATI NIP : 19741231 200701 2 045 Gol : II/c Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
43	KECAMATAN PANAKKUKANG	Nama : MUSRIATI NIP : 19810215 201410 2 001 Gol : II/c Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
44	KECAMATAN RAPPOCINI	Nama : SAWIR HIDAYANI, A. Md NIP : 19750626 201410 1 001 Gol : II/d Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
45	KECAMATAN TALLO	Nama : SUFIYANI, SE NIP : 19830616 201410 2 001 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
46	KECAMATAN TAMALANREA	Nama : UMRAH USMAN NODY, S. Kom NIP : 19930816 202012 2 007 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
47	KECAMATAN TAMALATE	Nama : MAUREN NATALI SUMULE, S. Kom NIP : 19841229 202012 2 001 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
48	KECAMATAN UJUNG PANDANG	Nama : ROSYIDAH HAMZAH, S. Kom NIP : 19920501 202012 2 009 Gol : III/a Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
49	KECAMATAN UJUNG TANAH	Nama : AFFANDI MAKMUR LIMPO, SH NIP : 19951204 202321 1 008 Gol : IX Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
50	KECAMATAN WAJO	Nama : HAMZAH NIP : 19780201 201001 1 013 Gol : II/c Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
51	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	Nama : RAHMATIA NIP : 19841231 201407 2 001 Gol : II/c Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO